

2.094 JEMAAH MENUJU MADINAH

Operasional Haji di Makkah Ditutup

MAKKAH (KR) - Operasional penyelenggaraan ibadah haji di Makkah berakhir Rabu (26/7) ditandai keberangkatan 2.094 jemaah haji Indonesia ke Madinah. Mereka terbang dalam enam kelompok terbang (kloter) dari tiga embarkasi, yaitu Solo (SOC), Jakarta-Bekasi (JKS) dan Surabaya (SUB).

Keberangkatan gelombang terakhir dari Makkah ke Madinah diawali 298 jemaah kloter 99 Embarkasi Solo (SOC 99). Mereka berangkat dari Mahbas Jin mulai pukul 10.00 waktu Arab Saudi (WAS). Sementara keberangkatan lima kloter lainnya dilakukan setelah waktu lohor. Kelimanya, JKS 74 (398) serta SUB 85 (358), SUB 86 (357), SUB 87 (354) dan SUB 88 (329). Mereka akan tinggal lebih kurang delapan hari di Madinah untuk beribadah di Masjid Nabawi sebelum pulang ke Tanah Air melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA).

"Ini hari terakhir pemberangkatan jemaah dari Makkah ke Madinah. Ada 2.094 jemaah yang tersebar di empat sektor pemondokan, yaitu sektor 2 (Mahbah Jin), sektor 4 (Syisah), sektor 5 (Syisah) dan sektor 7 (Raudhah)," terang Kepala Daker Makkah Khalilurrahman saat melepas ke-

berangkatan jemaah SUB 85 di Syisyah Makkah.

Menurut Khalil, operasional jemaah haji di Makkah dimulai sejak 2 Juni 2023, ditandai kedatangan perdana jemaah yang berangkat pada gelombang pertama dari Madinah. Sejak itu, jemaah terus berdatangan ke kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selain dari Madinah, mulai 8 Juni 2023, Daker Makkah juga menerima kedatangan jemaah haji yang berangkat pada gelombang kedua. Proses kedatangan ini berlangsung hingga 24 Juni 2023.

Data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat, total ada 558 kloter dengan 209.728 jemaah yang tiba di Arab Saudi. Sebanyak 276 kloter dengan 103.809 jemaah datang melalui Bandara AMAA Madinah, sementara 282 jemaah dengan 105.973 jemaah datang melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah.

Fase kepulangan jemaah haji Indonesia dimulai 4 Juli 2023, melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Tahap ini berlangsung hingga 19 Juli 2023. Siskohat mencatat ada 264 kloter dengan 99.919 jemaah yang pulang ke Tanah Air melalui Jeddah. (Ati)-d



KR-Surya Adi Lesmana

DESTINASI JEJAK ERUPSI: Sejumlah pengunjung mengamati benda-benda jejak sejarah erupsi Gunung Merapi 26 Oktober 2010 di petilasan Mbah Maridjan di Kinahrejo, Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, Rabu (26/7/2023). Di tengah menjamurnya destinasi baru, tempat ini tetap menjadi tujuan utama para wisatawan baik domestik maupun mancanegara saat berkunjung ke DIY.

PRESIDEN MINTA TNI-POLRI

Siapkan Hadapi Ancaman Teknologi

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para Perwira Muda TNI dan Polri untuk tidak ketinggalan dan selalu siap dalam menghadapi dunia kemiliteran dan Kepolisian yang berubah dengan sangat cepat. Presiden juga meminta perwira TNI dan Polri untuk terus meningkatkan sinergitas, komunikasi, interaksi, serta kerja sama untuk memecahkan masalah-masalah bersama.

"Amati terus perkembangan teknologi, siapkan diri terhadap ancaman yang juga menggunakan teknologi, agar kita mampu menjalankan tugas dengan baik," ujar Presiden saat memimpin Upacara Prasetya Perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pelantikan Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), di Halaman Depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/7).

Turut mendampingi Presiden, Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hadir juga antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Presiden Jokowi melantik dan mengambil sumpah 833 orang Calon Perwira Remaja (Capaja) TNI dan Polri. Pelantikan dilakukan pada

Upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI-Polri Tahun 2023. Para perwira yang dilantik terdiri 357 perwira dari Akademi Militer (Akmil), 94 perwira dari Akademi Angkatan Laut (AAL), 114 perwira dari Akademi Angkatan Udara (AAU), dan 268 perwira dari Akademi Kepolisian (Akpil).

Sekretaris Militer Presiden Laksada TNI Hersan membacakan peraih Adhi Makayasa (Lulus Terbaik) yakni Letnan Dua (Inf) Sawung Setiawan dari Akmil, Letda (Pelaut) Hermawan Burhanudin Tri Putro (AAL), Letda (Penerbang) Muhammad Galuh Safari Rahmat (AAU), dan Inspektur Polisi Dua Irfan Urane Azis (Akpil).

Presiden mengatakan, perubahan dunia yang sangat cepat, disrupti teknologi yang sangat pesat, serta geopolitik yang sangat dinamis saat ini, juga harus disikapi secara tepat dan cepat. "Saya minta kepada Saudara-saudara untuk terus belajar, menempa kemampuan dan keahlian, menguasai pengetahuan

dan teknologi, dan terus berinovasi," ujarnya.

Di hadapan 833 Perwira Muda TNI-Polri yang dilantik tersebut, Presiden menyampaikan bahwa mereka akan memulai perjalanan pengabdian yang nyata untuk membuktikan kemampuan dan kesetiaan dalam mengemban tugas melayani masyarakat, bangsa, dan negara. "Tugas Saudara-saudara tidak mudah, menjaga stabilitas keamanan negara, menjaga tegaknya NKRI, meneruskan tongkat estafet kepemimpinan bangsa, dan Saudara-saudara akan menghadapi situasi yang sangat berbeda," katanya.

Karena itu, Presiden meminta perwira TNI dan Polri untuk terus meningkatkan sinergitas, komunikasi, interaksi, serta kerja sama untuk memecahkan masalah-masalah bersama. "Siapkan diri Anda sebagai teladan masyarakat, menjaga integritas, menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai keprajuritan, selalu di depan membantu masyarakat luas," pesannya.

Presiden juga meminta para perwira tersebut untuk dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta tegak lurus pada konstitusi dan aturan. "Buatlah orantumu bangga. Buatlah bangsamu bangga. Kehormatan bangsa dan negara kini di pundak kalian semuanya, jaga, rawat, dan harumkan," tandas Presiden. (Sim)-d

UNTUK PRODUK WINE

BPJPH Tak Terbitkan Sertifikat Halal

JAKARTA (KR) - Sempat viral dalam beberapa hari belakangan, informasi tentang adanya penjualan produk red wine dengan merek Nabidz yang diklaim telah bersertifikat halal pada media sosial. Merespons hal tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan sertifikat halal untuk produk wine.

"Terkait informasi adanya penjualan online produk wine dengan merek Nabidz yang diklaim telah bersertifikat halal, kami perlu tegaskan bahwa BPJPH tidak pernah menerbitkan sertifikat halal bagi produk wine," kata Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham di Jakarta, Rabu (26/7).

"Berdasarkan data di sistem Sihalal, kami pastikan memang ada produk minuman dengan merek Nabidz yang telah mendapatkan sertifikat halal dari

BPJPH. Namun produk tersebut bukanlah wine atau red wine, melainkan produk minuman jus buah," lanjut Aqil menjelaskan.

Produk jus buah merek Nabidz, lanjut Aqil, telah diajukan sertifikasi halal pada 25 Mei 2023 melalui mekanisme self declare dengan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) yang dilakukan oleh Pendamping PPH.

Pengajuan tersebut telah diverifikasi dan divalidasi pada 25 Mei 2023, dengan produk yang diajukan berupa jus/sari buah anggur merek Nabidz. Pendamping PPH juga telah memastikan bahan-bahan yang digunakan adalah bahan halal. Proses produksi yang dilakukan pelaku usaha juga sederhana, dan pelaku usaha menyatakan tidak ada proses fermentasi di dalamnya. Adapun foto produk yang diunggah pada Sihalal juga berupa kemasan botol plastik. (Ati)-d

Masyarakat Diminta Waspada Penipuan Atasnamakan BPJS Kesehatan

JAKARTA (KR) - Merespons adanya modus penipuan mengatasnamakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Agustian Fardianto minta kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati terhadap modus tersebut. Ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dan tetap tenang dengan berbagai modus yang terjadi di masyarakat.

"Saat ini sedang terjadi modus penipuan yang mengatasnamakan Care Center BPJS Kesehatan dengan menginformasikan bahwa kartu kepesertaan JKN akan diberhentikan. Kami menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak pernah menaaktifkan kartu kepesertaan JKN secara sepihak tanpa ada alasan yang jelas," kata

Fardianto di Jakarta, Rabu (26/7).

Fardianto menyebut, sebelumnya juga sempat muncul berbagai modus penipuan lainnya yang juga mengatasnamakan BPJS Kesehatan, seperti peserta diminta untuk menyebutkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), mengatasnamakan badan usaha, menyampaikan informasi palsu bahwa kartu kepesertaan peserta telah melebihi batas pemakaian terhadap obat-obatan.

Selain itu, terdapat juga modus penipuan lainnya yang pernah terjadi di masyarakat seperti modus penipuan yang menyebutkan BPJS Kesehatan memberikan bantuan sosial kepada peserta, modus rekrutmen kepegawaian hingga ancaman yang menyatakan bahwa kepesertaan JKN akan segera diblokir. (Ati)-d

100 GURU IKUTI CAMPING KEBERAGAMAN

Kaum Milenial Rentan Terpapar Paham Radikal

YOGYA (KR) - Sebanyak 100 guru berbagai jenjang (dari PAUD hingga SMA) di DIY mengikuti kegiatan bertajuk Camping Keberagaman dalam Pencegahan Radikal Terorisme dengan Kampanye Damai Beragama dan Pembuatan Video Bahan Ajar bertema 'Berkolaborasi untuk Damai Beragama di Sekolah' di Asrama Haji Yogyakarta, Rabu (26/7).

Kegiatan ini diselenggarakan Bidang Agama, Sosial-Ekonomi dan Budaya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DIY berkolaborasi dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI. Hadir sebagai narasumber dari BNPT, Kanwil Kemenag DIY dan akademisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Turut mendukung kegiatan ini Badan Ke-



KR-Devid Permana

Kolonel Pas Drs Soedjatmiko menyampaikan arahan.

satuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Forkom-pimda DIY.

Kabid Perempuan dan Anak FKPT DIY, Fatma Amelia SAG MSi menuturkan, tindak pidana terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan karena bisa menasar siapa saja termasuk perempuan, anak dan orangtua. Untuk melindungi anak dari paparan paham radikal terorisme, peran guru di seko-

lah sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan keterampilan guru dalam menyampaikan materi tentang anti-radikal dan antiterorisme kepada anak dengan cara menarik, melalui video bahan ajar.

"Setelah mengikuti kegiatan ini termasuk pembuatan video bahan ajar, guru bisa mentransfer pengetahuan dan informasi kepada murid-muridnya

agar memiliki pengetahuan, sehingga bisa menangkal paparan paham radikal terorisme," terang Fatma saat acara pembukaan. Turut hadir dalam acara, perwakilan Polda DIY, Korem 072 Pamungkas, Lanal Yogyakarta dan BIN DIY.

Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT RI Mayjen TNI Nisan Setiadi SE dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kasubdit Bina Masyarakat BNPT Kol Pas Drs Soedjatmiko mengatakan, hal yang membedakan antara tindak pidana terorisme dengan kriminal biasa adalah aksi terorisme dilatarbelakangi motif ideologi.

Pahama radikal terorisme ini berkembang mulai dari benih intoleransi menjadi radikalisme dan berkembang lagi menjadi aksi terorisme. (Dev)-d

8 Penambang

Kompul Agus Supriadi yang menerima informasi kejadian tersebut mendatangi lokasi untuk melakukan evaluasi dan penyelidikan. Kompul Agus Supriadi menjelaskan, setelah dilakukan penyelidikan, dari hasil interogasi terhadap Karipto (Kadus) menyebutkan untuk tambang emas yang ada statusnya belum berizin dan telah mulai dari tahun 2014. "Untuk pembukaan tambang ini

ada kesepakatan antara pemilik lahan dengan penambang dengan persentase bagi hasil 20 persen untuk pemilik lahan, 20 persen untuk pemodal, 60 persen untuk pekerja," katanya.

Di Dusun Tajur, setidaknya 35 lapak tambang yang terdiri 30 aktif dan lima tidak aktif dengan pekerja masyarakat sekitar Berkaitan penambangan tersebut, Polresta Banyumas bersama

perangkat desa dan Dinas ESDM Banyumas pernah melakukan sosialisasi pada tahun 2017 kemudian ada permintaan dari warga untuk tambang tetap beroperasi. Kemudian koperasi 'Sela Kencana' sebagai wadah para penambang tahun 2021 mengajukan permohonan IPR ke Dinas ESDM Provinsi Jateng namun sampai sekarang belum turun izinnya. (Dri)-f

Sambungan hal 1

10 Jam

sekitar pukul 07.30 WIB dan selesai diperiksa pukul 17.36 WIB.

Budi Karya mengatakan, ia dipanggil lembaga antirasuah sebagai saksi dalam kasus tersebut. Meski demikian, Budi enggan berkomentar soal pemeriksaannya dan mengarahkan pernyataan soal pemeriksaannya ke penyidik KPK.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan KPK, Rabu (26/7) memanggil Menhub Budi Karya Sumadi sebagai saksi. Atas panggilan itu, yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

"Kami mengkonfirmasi, betul KPK memanggil sebagai saksi Menhub dan Sekjen Kemenhub betul sudah hadir di Gedung

Polri

Skema tersebut memungkinkan adanya kerja sama police to police sehingga penangkapan buron dapat lebih cepat. "Ini untuk membantu kerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang ada dengan DPO yang bisa diberikan," ungkap Kapolri.

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, Divisi Hubinter Polri (Interpol Indonesia) sejauh ini belum menerima informasi dari Interpol Kamboja mengenai kabar buron Harun Masiku berada di negara itu dan telah berganti kewarganegaraan. "Sejauh ini Interpol Kamboja belum memberikan informasi terkait rumor itu," katanya.

Menurut Ramadhan, dengan sudah diter-

Sambungan hal 1

KPK C1," jelas Ali Fikri.

Pihaknya mengapresiasi kerja sama Menhub yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan kepada penyidik KPK. Pada awalnya KPK memanggil Menhub pada Kamis (14/7) sebagai saksi kasus dugaan suap di DJKA Kemenhub terkait dengan pembangunan jalur kereta api di Sulawesi Selatan, Jateng, Jabar dan Jawa-Sumatera pada tahun anggaran 2018-2022.

Terkait hal ini yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jateng Putu Sumarjaya. Meski demikian pihak Menhub kemudian berikirim surat ke KPK untuk konfirmasi penjadwalan ulang pemeriksaan karena yang bersangkutan sedang dalam perjalanan dinas. (Ful)-f

Sambungan hal 1

bitkannya red notice maka apabila Harun Masiku melalui perlintasan resmi di negara manapun, anggota Interpol pasti akan mendeteksi. "Kewajiban dari Interpol negara tersebut untuk menahan subjek dan menginformasikan ke Interpol Indonesia sebagai negara penerbit atau peminta red notice," katanya.

Untuk menindaklanjuti kabar Harun Masiku berada di Kamboja, tambah Ramadhan, Interpol Polri mengirimkan permintaan kepada Interpol Kamboja melalui channel 1-24/7 dalam rangka mengklarifikasi kabar tersebut. "Interpol Indonesia sudah mengirimkan permintaan kepada Interpol Kamboja melalui chanel 1-24/7 terkait klarifikasi terhadap isu tersebut," ujar Ramadhan. (Ant)-f